

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 605/MPP/Kep/8/2002

**TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR, KOTA PALEMBANG, KOTA SURABAYA
KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA YOGYAKARTA DAN KOTA MEDAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001, perlu menetapkan dan mengangkat anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Medan;
- b. bahwa berdasarkan usulan dari Walikota pada Pemerintah Kota tersebut pada huruf a dan hasil Tim Pusat Penyeleksi Penetapan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen perlu menetapkan nama-nama anggota yang diangkat pada masing-masing pemerintah kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makasar;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 208/M/2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi, Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 419/MPP/Kep/4/2001 tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Penetapan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Memperhatikan :

1. Keputusan Walikota Makassar Nomor 22/KEP/301.05/2002 tanggal 28 Januari 2002 tentang Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar;
2. Keputusan Walikota Palembang Nomor 364 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Palembang Nomor 24-6 Tahun 2002 tanggal 28 Maret 2002;
3. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/106/402.1.2/2002 tanggal 19 Maret 2002 tentang Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya;
4. Keputusan Walikota Bandung Nomor 500/Kep.495-EK/2002 tanggal 4 April 2002 tentang Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung;
5. Keputusan Walikota Semarang Nomor 500.05/449 tanggal 22 Desember 2001 tentang Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Semarang;
6. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 042/KD/Tahun 2002 tanggal 1 Maret 2002 tentang Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta;
7. Keputusan Walikota Medan Nomor 510.06/1602K tanggal 2 Agustus 2002 tentang Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada masing-masing Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, dan Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa kerja anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Kepada anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan Honorarium setiap bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pembayaran Honorarium terhitung sejak pelantikan sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2002 dibebankan kepada DIP Proyek Pemberdayaan Perlindungan Konsumen Tahun Anggaran 2002 (Mata Anggaran 01.5203.B.5960) pada Direktorat Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Pembayaran Honorarium Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhitung mulai 1 Januari 2003 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masing-masing Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

- KEEMPAT : Menginstruksikan kepada semua Anggota yang telah diangkat dan dilantik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII Keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

RINI M SUMARNO SOEWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depperindag;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Sumatera Utara;
5. Para Ketua DPRD Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan;
6. Para Walikota Makassar, Palembang, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Medan;
7. Para Kepala Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Sumatera Utara;
8. Para Kepala Dinas Perindag Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan;
9. Direktur Perlindungan Konsumen, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Biro Kepegawaian Depperindag;
10. Yang bersangkutan
11. Pertinggal

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 605/MPP/Kep/8/2002

TANGGAL : 29 Agustus 2002

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PBSK
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

I. Unsur Pemerintah :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Drs H Nohong Umroh, MBA
Wakil Kepala Dinas Perindag Kota Makassar | Sebagai Anggota |
| 2. Ruslan Abu , SH
Wakil Kepala Dinas Keindahan Kota Makassar | Sebagai Anggota |
| 3. Dr. H Andi Takdir. M Kes
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar | Sebagai Anggota |

II. Unsur Pelaku Usaha :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Drs. Aldin Bule'n, SH
BPD HIPMI Sulawesi Selatan | Sebagai Anggota |
| 2. Syamsul Arief Siara, SE, MM
BPC HIPMI Kota Makassar | Sebagai Anggota |
| 3. Drs A Buana Paty
Forum Daerah Usaha Kecil Menengah Sulawesi Selatan | Sebagai Anggota |

III. Unsur Konsumen

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Andi Sofyan , SH, MH
LPKSM Quality | Sebagai Anggota |
| 2. Rustan , SH, MH
LPKSM Mitra Sejati | Sebagai Anggota |
| 3. Andi Megawati, SH
LPKSM Amal Mandiri | Sebagai Anggota |

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN RI**

RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 605/MPP/Kep/8/2002
TANGGAL : 29 Agustus 2002

DAFTAR NAMA ANGGOTA PBSK
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

I. Unsur Pemerintah :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Drs Rianum Syamsudin
Wakil Kepala Dinas Perindag Kota Palembang | Sebagai Anggota |
| 2. Mahya Abunakir, SH
Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Palembang | Sebagai Anggota |
| 3. Faris Malik, SH
Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Palembang | Sebagai Anggota |

II. Unsur Pelaku Usaha :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Drs. H Hasannuri, AR
KADIN Daerah Kota Palembang | Sebagai Anggota |
| 2. Ir. H Bahder Johan
KADIN Daerah Kota Palembang | Sebagai Anggota |
| 4. Dra Halimah Yasmin
KADIN Daerah Kota Palembang | Sebagai Anggota |

III. Unsur Konsumen

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Benny Irawan , SH
Yayasan Lembaga Konsumen Sriwijaya | Sebagai Anggota |
| 2. Hibzone Firdaus, SH
Yayasan Lembaga Konsumen Palembang | Sebagai Anggota |
| 3. Inggaris Nugroho DT, SH
Yayasan Lembaga Konsumen Palembang | Sebagai Anggota |

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN RI

RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 605/MPP/Kep/8/2002
TANGGAL : 29 Agustus 2002

DAFTAR NAMA ANGGOTA PBSK
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

I. Unsur Pemerintah :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Mas Bambang Suprihadi, SH. Msi
Staf Khusus Dinas Perindag Kota Surabaya | Sebagai Anggota |
| 2. Dr. H Slamet Santoso. Mkes
Kasub Dinas Kesehatan Keluarga Kota Surabaya | Sebagai Anggota |
| 3. Budi Basarudin, SH, MM
Kasub Dinas Terminal Dinas Perhubungan Kota Surabaya | Sebagai Anggota |

II. Unsur Pelaku Usaha :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Mushoddiq, SH
DPR REI Jawa Timur | Sebagai Anggota |
| 2. Ir. Edison Siregar
KOPADIN Kota Surabaya | Sebagai Anggota |
| 3. Bagus Taruno Legowo
BPC ARDIN Kota Surabaya | Sebagai Anggota |

III. Unsur Konsumen

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Prof. Dr. Indrati Rini, SH, Ms
Yayasan Konsumen Surabaya | Sebagai Anggota |
| 2. Soemali, SH
Yayasan Pusat Studi Advokasi Konsumen | Sebagai Anggota |
| 3. Dr. Rasyid Mohammad Tauhid. A
Yayasan Konsumen Surabaya | Sebagai Anggota |

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN RI

RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 605/MPP/Kep/8/2002
TANGGAL : 29 Agustus 2002

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PBSK
PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

I. Unsur Pemerintah :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Drs. H Suherdi Sukandi
Penyuluh Perindag Madya Dinas Perindag Kota Bandung | Sebagai Anggota |
| 2. Ir. Sri Susiati
Kasub Dinas Pengawasan Mutu Dinas Pertanian Kota Bandung | Sebagai Anggota |
| 3. Dr. Hj Tetty K Djajaprawira, MKM
Kasub Dinas Farmasi, Makanan & Minuman Dinas Kesehatan
Kota Bandung | Sebagai Anggota |

II. Unsur Pelaku Usaha :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Drs. Cucu Sutara
BPD Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan
Distribusi Indonesia (ARDIN) Kota Bandung | Sebagai Anggota |
| 2. Ir. Bagoes Ellan Bagasari
DPH Asosiasi Perusahaan Alat dan Mesin
Pertanian Indonesia (ALSINTANI) Jawa Barat | Sebagai Anggota |
| 3. Bennovel,SH
BPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional
Indoneisa (GAPENSI) Kota Bandung | Sebagai Anggota |

III. Unsur Konsumen

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Drs. Cecep Suhaeli
Yayasan Harkat Konsumen | Sebagai Anggota |
| 2. Drs. Tatto Sutanto, Msi
Yayasan Pemberdayaan Konsumen Indonesia | Sebagai Anggota |
| 3. Yayan Sutarna, SH
Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia | Sebagai Anggota |

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN RI

RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 605/MPP/Kep/8/2002

TANGGAL : 29 Agustus 2002

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PBSK
PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

I. Unsur Pemerintah :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Bambang Purnomo S. SH
Kasubdin Perdagangan Dinas Perindag Kota Semarang | Sebagai Anggota |
| 2. Dr. Messy Widiastuti
Kasubdin Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan | Sebagai Anggota |
| 3. Ir. Sutrisno Jatmoko
Kasubdin Produksi Dinas Pertanian Kota Semarang | Sebagai Anggota |

II. Unsur Pelaku Usaha :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Niken Puspitarini, SH
Kadinda Kota Semarang | Sebagai Anggota |
| 2. Titi Herwati Soeryabrata, SH, MHum
Kadinda Kota Semarang | Sebagai Anggota |
| 3. Jantje Bambang Supriyanto, SH
Kadinda Kota Semarang | Sebagai Anggota |

III. Unsur Konsumen

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Drs. Muchammad Faishal, SH
Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen | Sebagai Anggota |
| 2. Drs. H Gunarto, MM
Lembaga Perlindungan Konsumen | Sebagai Anggota |
| 3. Drs. Ragil Wiratno
Lembaga Advokasi dan Pembelaan Konsumen | Sebagai Anggota |

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN RI**

RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 605/MPP/Kep/8/2002
TANGGAL : 29 Agustus 2002

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PBSK
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

I. Unsur Pemerintah :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dra Ida Farida
Kasubdin Perdagangan Dinas Perekonomian Pemerintah
Kota Yogyakarta | Sebagai Anggota |
| 2. Drs. H. Bambang Subroto APT,M.Kes
Kabid Pengawasan Balai POM DI Yogyakarta | Sebagai Anggota |
| 3. Hadi Muhtar, SE,MM
Kasubdin Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Yogyakarta | Sebagai Anggota |

II. Unsur Pelaku Usaha :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Andreas Budi Susetia, SE, MBA
Wakil Ketua KADIN Kota Yogyakarta | Sebagai Anggota |
| 2. Drs. Abdul Haris
DPP Gabungan Pengusaha Kecil Nasional Minyak dan
Gas Bumi (GAPINA-MIGAS) | Sebagai Anggota |
| 3. Ir. Eka Dewi Novianti
Kadinda Kota Yogyakarta / HIPMI | Sebagai Anggota |

III. Unsur Konsumen

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Anggreani, SH
YLKI Yogyakarta | Sebagai Anggota |
| 2. Aloysius Wisnubroto, SH, M.Hum
YLKI Yogyakarta | Sebagai Anggota |
| 3. Gregorius Widiartana, SH, M Hum
YLKI Yogyakarta | Sebagai Anggota |

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN RI

RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 605/MPP/Kep/8/2002

TANGGAL : 29 Agustus 2002

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PBSK
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

I. Unsur Pemerintah :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Drs H Adios Gusri, MM
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Medan | Sebagai Anggota |
| 2. H. Suwarno , SH
Kepala Sub Dinas Industri dan Dagang Kecil Menengah
Dinas Perindag Kota Medan | Sebagai Anggota |
| 3. T. Nasrul, SH
Kepala Sub Dinas Perdagangan Dinas Perindag
Kota Medan | Sebagai Anggota |

II. Unsur Pelaku Usaha :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. DR. Soeherman Gatot, SE,SH, MBA
Dewan Pengurus Kadinda Kota Medan | Sebagai Anggota |
| 2. Drs. Anwar S, Ak
BPD assosiasi Eksportir Kopi Indonesia
(AEKI) Sumatera Utara | Sebagai Anggota |
| 3. Golkas Butar Butar, SH
BPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional
Indonesia (GAPENSI) Kodati-II Medan | Sebagai Anggota |

III. Unsur Konsumen

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Abu Bakar Sidik, SH
YLKI Kota Medan | Sebagai Anggota |
| 2. K. Anwar, SH
Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional | Sebagai Anggota |
| 3. Drs. Dharma Bakti Nasution, SH
Lembaga Advokasi Konsumen Indonesia | Sebagai Anggota |

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN RI**

RINI M SUMARNO SOEWANDI